

TAJUK RENCANA

Pelajaran dari 'Pecel Lele'

PEPATAH mengatakan, 'karena nilai setitik, rusak susu sebelanga', rasa pas untuk tragedi kuliner 'pecel lele' di wilayah Malioboro, belum lama ini. Viral mengenai pedagang pecel lele di kawasan Jalan Perwakilan Yogyakarta yang mumpung dibeli dan memasang harga tinggi bagi pembeli luar kota. Kebetulan pembeli tersebut memviralkan, membeli 'pecel lele' melalui media sosial. Intinya hati-hati membeli makanan di Malioboro. Yogya yang terkenal ramah harganya, ternyata tak terbukti, katanya viral di media sosial.

Inilah yang kemudian menyamaratakan, pedagang yang membuat sepi pembeli. Bukan hanya kuliner, namun seluruh pedagang di jalan yang jadi ikon kota wisata tersebut menjadi terkena getah dari ulah pedagang tersebut.

Peristiwa semacam ini, sebenarnya bukan hanya sekali. Namun beberapa tahun lalu pernah terjadi. Bukan hanya makanan, namun parkir kendaraan yang harganya tak wajar, sering viral yang membuat citra pariwisata Yogya memprihatinkan. Fakta yang menjadi bertentangan dengan kampanye untuk wisata Yogya yang ramah, nyaman dan berbudaya yang sedang digalakkan.

Kasus 'pecel lele', akhirnya diselesaikan dengan menutup sementara pedagang yang nuthuk pelancong. Wakil Walikota Yogya Heru Purwadi, cepat merespons peristiwa tersebut. Wisatawan yang menggonggah viral sudah diklarifikasi, dan menyebut nama warung itu (KR 30/5). Sebenarnya aturan ancaman ditutup sementara sudah lama diterapkan, tetapi tetap saja dilanggar. Wakil Ketua Paguyuban Pedagang Lesehan Malioboro, sepatok mendukung tindakan Pemerintah Kota Yogya. Sambal menjelaskan, kesepakatan bahwa pecel lele, penjualannya sudah satu paket dengan

nasi dan lalapan. Bukan dipisah hanya agar harganya tinggi.

Kasus tersebut sebagai pelajaran berharga, introspeksi untuk semua pihak. Bahwa saat ini platform media sosial yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk komunikasi dan promosi pariwisata. Bahwa platform media sosial seperti Instagram, WhatsApp atau Facebook sangat berpotensi besar memberikan efek sangat signifikan bagi persepsi dan emosi wisatawan selama melakukan perjalanannya. Karenanya, wisatawan bisa menyatakan gembira karena layanan atau lokasi yang bagus, sehingga destinasi pariwisata bisa lebih berwarna. Maka secara tidak langsung, wisatawan tersebut membantu mempromosikan daerah wisata yang baru dikunjunginya. Tetap sisi lain, emosi dan persepsi wisatawan yang geram karena merasa 'dikerjain' di sebuah destinasi menjadi tak terlakan.

Karena itu, memanfaatkan media sosial untuk kepentingan pariwisata DIY sangat baik. Sebab strategi *marketing* melalui media *online*, sudah menjadi satu keniscayaan yang harus dilakukan saat ini. Kemudahan mengakses media sosial secara pribadi, mustinya bisa digunakan untuk membangun *branding*, sebagai bagian dari bisnis pariwisata. Kita juga tahu bahwa kreativitas anak-anak muda Yogya juga sangat potensial. Destinasi baru yang muncul, rumah makan atau *cafe* bahkan pasar tradisional yang menyediakan makanan tradisional di DIY sangat terdorong melalui platform media sosial.

Mudah-mudahan tragedi 'pecel lele' di Yogya, menjadi pelajaran berharga untuk saling introspeksi diri. Sebab gara-gara soal makanan, bisa merusak citra Yogya dan pendapat ribuan orang. (***)

Menagih UU Perlindungan Data Pribadi

Sarworo Soeprapto

BERULANG dan terus berulang. Demikian kejadian bocornya data pribadi yang tersimpan di berbagai lembaga/institusi, baik pemerintah maupun swasta. Peristiwa terakhir menyangkut 279 juta data pribadi WNI yang tersimpan di BPJS Kesehatan.

Rentetan bocornya data pribadi yang tersimpan di berbagai lembaga, terjadi lima tahun belakangan ini. Awal tahun lalu (2020), data 125 ribu mahasiswa Undip yang tersimpan di universitas tersebut diretas pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebelum itu, data pribadi yang berhasil dibobol *hacker* (peretas) adalah data pribadi yang dikuasai Tokopedia, Gojek dan Bukalapak.

Khusus bocornya data pribadi milik pengguna *platform* digital *startup unicorn* tidak seheboh bocornya data pribadi milik mahasiswa Undip dan peserta BPJS Kesehatan. Karena data pribadi yang tercatat relatif terbatas (nama, nomor telepon dan email) dan dengan cepat berhasil diatasi pengelola perusahaan, dengan cara pengubahan *password*. Tetapi data pribadi yang tersimpan di lembaga pemerintah, seperti BPJS Kesehatan, cukup lengkap (karena tidak berbeda dengan data pribadi warga yang tersimpan di otoritas kependudukan negara), tidak jelas penanganannya. Pihak pemilik data pribadi tidak bisa berbuat apa-apa.

Regulasi

Sebagaimana kejadian lain, bocornya data pribadi yang terus saja berulang pasti selalu menimbulkan kehebohan. Semua pihak seperti kebakaran jenggot. Anehnya, kehebohan itu hanya berlangsung sesaat, dan tidak segera diikuti upaya penangan yang relatif komprehensif.

Khusus kebocoran data pribadi warga, diprediksi tak akan menimbulkan kehebohan berulang kalau jajaran eksekutif dan legislatif sudah mengantisipasi sejak awal. Sejak diberlakukannya UU No 23 Th 2006 tentang Adminis-

trasi Kependudukan. Yang antara lain menyebutkan bahwa data pribadi sebagai informasi yang bersifat rahasia, dan negara - melalui lembaga-lembaganya - menjamin terlindunginya informasi tersebut. Disusul pemberlakuan UU ITE (2008) serta pembuatan KTP elektronik (2009), idealnya regulasi tentang perlindungan data pribadi warga negara segera disusun. Kenyataannya,



sampai akhir 2020 regulasi yang dimaksud belum juga hadir.

Akibat belum hadirnya regulasi khusus perlindungan data pribadi WNI, kasus-kasus kebocoran data pribadi tak bisa dicegah dan tak bisa segera teratasi. Kejadian yang terus berulang dan selalu menimbulkan kehebohan di kalangan publik mempertontonkan dengan jelas kebodohan kita sebagai sebuah bangsa.

Legislatif Lelet

Indonesia sesungguhnya sudah memiliki regulasi tentang perlindungan data pribadi. Tetapi regulasi yang ada belum begitu komprehensif, dan terserak dalam berbagai UU, seperti UU Administrasi Kependudukan, UU ITE,

dan UU Perbankan. Juga sudah ada peraturan menteri, yakni Permen Kominfo No 20 Th 2016, yang substansinya khusus perlindungan data pribadi. Namun harus diakui, regulasi yang ada belum begitu komprehensif dan tidak bersifat khusus, sehingga tidak cukup ampuh untuk mencegah dan mengatasi kasus-kasus bocornya data pribadi yang marak terjadi.

Tahun lalu, tepatnya 24 Januari 2020 pemerintah sebetulnya sudah mengajukan RUU Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) ke DPR. Tgl 1 Juli 2020 RUU PDP dibahas DPR dengan para pakar. Selanjutnya 7 September 2020 diadakan raker pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU PDP oleh DPR Bersama Menkominfo, Mendagri dan Menkumham. Pada mulanya RUU PDP ditargetkan selesai dibahas Oktober 2020, tetapi molor. Sampai akhir 2020 RUU PDP tetap belum menghasilkan disahkan sebagai UU.

Pada 23 Maret 2021 DPR memasukkan kembali RUU PDP ke dalam Prolegnas 2021. Sampai akhir April 2021 masih dilakukan pembahasan. Berakhirnya kapan, masih belum jelas. Hal ini menunjukkan bahwa legislatif begitu lelet dalam membahas regulasi perlindungan data pribadi. Pertanyaannya: sampai kapan ada UU PDP yang mampu menjamin terlindunginya data pribadi WNI?

*) Sarworo Soeprapto, peminat masalah keterbukaan informasi publik.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Bakmi Politik ala Ganjar Pranowo

Paulus Mujiran

SECARA mengejutkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak diundang dalam acara HUT ke-48 PDIP dan penghargaan terhadap kader PDIP di Panti Marhaen Semarang, Sabtu (22/5) yang dihadiri Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dalam undangan, semua kepala daerah, DPR dan DPRD diundang kecuali Gubernur Jawa Tengah.

Secara terbuka Ketua DPD PDIP Jawa Tengah Bambang Wuryanto menyatakan tidak diundangnya Ganjar karena ambisinya menjadi presiden sudah kelewatan. Puan Maharani yang hadir di acara tersebut pun dalam pengarahannya menyindir pemimpin harus hadir bersama rakyat di lapangan bukan di media sosial.

Gubernur Ganjar Pranowo memang sejak di DPR sudah aktif bermain di media sosial. Di tengah hiruk pikuk ketidakhadirannya di Panti Marhaen, Ganjar justru memposting di media sosialnya aksi makan mie yang katanya, mengingatkan dirinya saat indokos di Yogya.

"Bengi-bengi kok pengin ngemi, kelingan jaman ngekos. Satu kurang, dua kebanyakan," tulisnya.

Ganjalan

Meski pemilu presiden/wakil presiden masih akan digelar pada tahun 2024 rupanya dinamika politik sudah bergerak. Di kandang banteng selain Ganjar ada Puan Maharani yang disebut-sebut diproyeksikan menjadi Calon Presiden (Capres) 2024. Artinya jika Ganjar maju dalam pilpres tentu menjadi ganjalan Puan Maharani untuk maju. Survei Akar Rumpit Strategic Consulting (ARSC) pada 22 Mei merilis elektabilitas Ganjar 11,25% dibawah Prabowo Subianto 14,31%.

Survei Lembaga Pendidikan, Penelitian, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) Prabowo Subianto di urutan teratas dengan 16,4%, disusul Anies Baswedan 12,8% dan Ganjar Pranowo 9,6%.

Sementara Litbang Kompas yang merilis surveinya pada 4 Mei posisi teratas masih Prabowo Subianto 16,4%, Anies Baswedan 10% dan Ganjar 7,3%.

Tingginya elektabilitas Ganjar yang cenderung *kinclong* rupanya membuat sebagian internal PDIP panas dingin. Sementara survei terkait Puan Maharani kurang begitu menyenangkan. Survei LSI (Januari 2021) elektabilitas Puan hanya 0,1%, SMRC (Februari-Maret 2021) 5,7%, Indikator (Maret 2021) 1,1%, dan Charta Politik Indonesia (April 2021) hanya 1,2%.

Membaca ketegangan antara Ganjar dan Puan, Pilpres 2024 rupanya menjadi momentum strategis bagi dinasti politik Megawati. Mengingat Pilpres 2014 dan 2019 anak kandung Puan Maharani belum siap. Kini sejumlah media mulai mendeductkan nama Prabowo Subianto-Puan Maharani di 2024 (KoranTempo 28/5).

Di tubuh PDIP, Megawati menjadi penentu satu-satunya seorang kader boleh maju sebagai bupati/walikota, gubernur, menteri hingga presiden/wakil presiden. Sehingga nyaris tertutup peluang seorang kader mempromosikan diri menjadi calon pemimpin tanpa mendapat restu Megawati. Survei elektabilitas kerap bukan jaminan diberikan rekomendasi. Tidak ada salahnya Megawati memberikan restu kepada anaknya, untuk menjadi capres/cawapres.

Ketika berhadapan dengan dinasti politik Teuku Umar, Ganjar pun pasti tahu diri bukan

dari trah Soekarno. Meski disebut banyak lembaga survei elektabilitasnya selalu di urutan 3 besar kecil kemungkinan bagi Ganjar untuk *mbalela* seperti halnya Rustringgih dulu. Namun demikian mengaitkan ketegangan antara Ganjar dan Puan ini dengan pancapras/pancawapras sejatinya masih terlalu dini.

Pilpres masih akan digelar 2014 yang besar kemungkinan konstelasi politik nasional masih dapat berubah seiring perjalanan waktu. Masih banyak kader potensial yang berpeluang maju baik dari PDIP atau partai lain. Calon pemimpin juga tidak hanya Ganjar dan Puan. Justru yang terpenting sekarang di tengah bangsa berjibaku dengan pandemi korona elit politik seyogyanya menahan diri untuk tidak membikin gaduh yang melukai hati rakyat.

*) Paulus Mujiran SSos MSI, pengamat politik, Alumnus Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang.

Pojok KR

Iklm sepakbola tanah air dianggap membaik
-- Asal janganan jadi arena berantem para suporter.

Tanggal 1 Juni kita memperingati hari lahir Pancasila.
-- Memaknai Pancasila, bukan sekadar memperingati.

Libur Panjang, DIY diserbu pemudik dan wisatawan.
-- Mudah-mudahan, tidak ada lonjakan kasus Covid-19.

Beraksi

PIKIRAN PEMBACA
Naskah bisa dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/Scan KTP
atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat
Jalan Margo Utomo 40 - 42 Yogyakarta 55323.
Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks.
Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Perlunya Integrasi Rumah DataKu dan SID

SEJAK diluncurkan pada tahun 2017, persis setahun setelah Kampung Keluarga Berencana (KB) diluncurkan pada tahun 2016, Rumah Data Kependudukan (Rumah DataKu) yang menjadi kelengkapan Kampung KB terus mengalami perkembangan dan penyempurnaan. Rumah DataKu telah semakin dikenal oleh masyarakat luas sebagai pusat data di level mikro yang meliputi data keluarga, kependudukan dan KB, potensi wilayah, data lintas sektor, dan data administrasi kependudukan yang telah berkembang keluasannya dari level pedukuhan menjadi level desa/kalurahan.

Ke depan, karena Rumah DataKu berada di tingkat desa/kalurahan maka data yang tersedia dengan ragam jenisnya harus juga mencakup seluruh wilayah desa/kalurahan. Itu artinya, integrasi Rumah DataKu dengan Sistem Informasi Desa (SID) semakin diperlukan. SID sendiri merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengelola data di desa/kalurahan yang dirancang sebagai alat untuk mendukung pelayanan di kantor desa/kalurahan. Fungsi yang dapat dilakukan antara lain administrasi kependudukan, perencanaan, pelaporan, inventarisir asset kantor desa, inventarisir sarana prasarana di desa, pengelolaan anggaran desa, layanan publik dan lain sebagainya.

Dalam perjalanannya, SID telah mampu mengelola data kependudukan secara efisien dan valid. Pemerintah desa/kalurahan akan lebih cepat mencari data penduduk, tidak perlu membuka Kartu Keluarga. Selain itu, jika ada data yang kosong ataupun bermasalah aplikasi akan memberitahukan pada operator. SID juga telah menjadikan pelayanan pada masyarakat lebih cepat, transparan-

si desa/kalurahan menjadi lebih baik dan mempermudah pelaporan bagi pemerintah desa/kalurahan pada masyarakatnya.

Integrasi Rumah DataKu dengan SID diperlukan agar data yang ada dengan ragam dan jenis data yang sama akan diperoleh angka yang tidak berbeda. Ini penting dalam rangka menguatkan posisi data itu sebagai bahan untuk penentuan kebijakan dan perencanaan pembangunan di desa/kalurahan maupun di Kampung KB. Sementara bagi desa/kalurahan dengan SID-nya, akan memperoleh banyak keuntungan bila berintegrasi dengan Rumah DataKu. Karena banyak data khusus yang dimiliki Kampung KB yang tidak dimiliki oleh desa/kalurahan. Di antaranya data kegiatan Kelompok Kegiatan (Poktan), data kesejahteraan keluarga, data KB dan pembangunan keluarga dengan segala intervensinya.

Sinkronisasi data antara SID dengan Rumah DataKu perlu dilakukan dengan komunikasi, koordinasi dan diskusi antara pemerintah desa/kalurahan dalam hal ini pengelola SID dengan pengelola Rumah Data, sehingga diperoleh kesepakatan data yang sama dengan cek ricek di lapangan. Diskusi sendiri diperlukan untuk memperoleh pengertian dan kesepakatan yang sama tentang suatu jenis data. Tentu ini bukan pekerjaan yang mudah. Tetapi dengan semangat untuk melahirkan data yang valid dan ter-update untuk kepentingan pembangunan di desa/kalurahan dan Kampung KB, tentu semua akan dapat dilakukan dengan lancar. Bersama kita bisa.

Drs Mardiyah,
Kepala Bidang
Pengendalian Penduduk
Dinas PMD Dalduk dan KB
Kabupaten Kulonprogo.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) Penasihat: Drs HM Idham Samawi. Komisaris Utama: Prof Dr Inajati Adrisjanti. Direktur Utama: M Wirmon Samawi SE MIB. Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE. Direktur Keuangan: Imam Satriadi SH. Direktur Umum: Yuriga Nugroho Samawi SE MM MSc. Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.

Pemimpin Umum: M Wirmon Samawi SE MIB. Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Drs H Octo Lampito MPd. Wakil Pemimpin Redaksi: Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. Redaktur Pelaksana: Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Musbahada. Manajer Produksi Redaksi: Ngabdul Wakid. Redaktur: Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabdandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. Fotografer: Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. Grafis: Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. Sekretaris Redaksi: Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display... Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga... Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris)... Rp 12.000,00/baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm, maks. 100 mm) Rp 12.000,00/mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm... Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300% dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) 563125, Telp (0274) 565685 (Hunting) Alamat Percetakan: Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) 496549 dan (0274) 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. Alamat e-mail: naskahkr@gmail.com. Radio: KR Radio 107.2 FM. Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. Kuasa Direksi: Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja.

Wartawan: H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Per Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. Magelang: Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsh, Kepala Biro: Drs M Thoha.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.